

STRATEGI PENINGKATAN TRANSAKSI BELANJA NEGARA MELALUI PENGGUNAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH PADA SATUAN KERJA MITRA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA METRO

Denny Satriyawan¹, Bambang Suhada², Febriyanto³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Metro, Metro, Indonesia

Email: ndodenny@gmail.com¹

basucpc@gmail.com²

febriyanto0223027901@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi dalam meningkatkan penggunaan kartu kredit pemerintah pada transaksi pembayaran belanja negara yang diawali dengan menemukan faktor-faktor yang dapat menarik satuan kerja untuk menggunakan Kartu Kredit Pemerintah. Penelitian ini dilakukan kepada 14 satuan kerja mitra Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Metro yang wajib menggunakan Kartu Kredit Pemerintah dan berlokasi di Kota Metro. Kemudian, analisis data pada penelitian ini menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP). Hasil penelitian menunjukkan kriteria fleksibilitas menjadi kriteria yang dianggap paling penting sebagai daya tarik penggunaan Kartu Kredit Pemerintah. Sedangkan, jangkauan luas (*multi platform*) menjadi alternatif yang dianggap paling penting untuk meningkatkan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah.

Kata kunci: Kartu Kredit Pemerintah, Pengeluaran Negara

Abstract

This study aims to formulate a strategy for increasing the use of government credit cards in state expenditure payment transactions, which begins with finding factors that can attract work unit to use government credit cards. This study was conducted on 14 partner work units of KPPN Metro which are required to use Government Credit Cards and are located in Metro City. Then, data analysis in this study used the Analytical Hierarchy Process (AHP) method. The results of the research show that flexibility is the criteria that is considered the most important attractiveness of using Government Credit Card. Meanwhile, wide reach (multi-platform) is the alternative that is considered the most important for increasing the use of Government Credit Cards.

Keywords: Government Credit Cards, Government Expenditure

PENDAHULUAN

Kementerian Keuangan Republik Indonesia berkomitmen penuh mendukung Gerakan Nasional Non Tunai khususnya dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), salah satu Langkah yang ditempuh adalah penerapan Kartu Kredit Pemerintah yang diatur melalui Peraturan Menteri

Keuangan (PMK) Nomor 196/PMK.5/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP).

Selain itu, belanja pemerintah melalui KKP merupakan inisiatif Kemenkeu khususnya Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam upaya menurunkan *cost of fund* yang diharapkan akan mendorong terciptanya

pengelolaan keuangan negara yang akuntabel. Kebijakan yang diterapkan adalah mengurangi Uang Persediaan tunai dengan menerapkan pembagian uang persediaan menjadi 2 bagian, pembagian uang persediaan menggunakan proporsi UP tunai sebesar 60% dan UP KKP sebesar 40% dari total uang persediaan. Tujuan dari implementasi kartu kredit pemerintah adalah:

1. Meminimalkan penggunaan fisik uang tunai;
2. Meningkatkan keamanan;
3. Mengurangi kemungkinan *fraud* pada APBN; dan
4. Pengurangan biaya dan kas menganggur dari penggunaan UP.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Metro yang merupakan salah satu unit vertikal dibawah Ditjen Perbendaharaan memiliki tiga wilayah pembayaran yaitu Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, dan Kota Metro. KPPN Metro memiliki 33 Satker yang wajib menggunakan KKP sesuai dengan peraturan. Rincian transaksi KKP pada satker KPPN Metro disajikan pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1: Data Transaksi Kartu Kredit Pemerintah Pada Satker Mitra KPPN Metro Tahun Anggaran 2019-2021

No.	Tahun	Jumlah Satker Pengguna KKP	Total Nilai Transaksi	Persentase Kenaikan/ Penurunan Transaksi
1	2019	13	Rp 140.234.003	-
2	2020	8	Rp 137.931.105	-1,64%
3	2021	5	Rp 77.937.656	-43,49%

Sumber: KPPN Metro, 2022

Dari data diatas terlihat bahwa setiap tahun terjadi penurunan penggunaan KKP pada satuan kerja mitra KPPN Metro. Sehingga implementasi KKP belum maksimal, dan perlu strategi untuk peningkatan penggunaan KKP sehingga tujuan awal penerapan KKP dapat tercapai

KAJIAN LITERATUR

Manajemen

George R. Terry (2014) menyampaikan pernyataan bahwa manajemen merupakan proses yang terdiri dari aktivitas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian dalam upaya menentukan dan memperoleh tujuan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

Selain itu, George R. Terry (2014) menyatakan, manajemen merupakan upaya pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dengan melibatkan orang lain. Sedangkan menurut Torang (2013) disebutkan manajemen, bagi setiap individu atau kelompok dalam suatu organisasi adalah hal penting dalam mencapai tujuan. Manajemen berkaitan erat dengan proses, dimana manajemen membutuhkan SDM, knowledge dan skill agar operasi berjalan efisien serta tujuan tercapai. Sebab itu, tidak ada organisasi yang dapat mencapai tujuannya kecuali menggunakan manajemen yang baik.

Sesuai definisi-definisi tersebut, penulis mendefinisikan manajemen merupakan ilmu merencanakan dan melaksanakan proses untuk mencapai tujuan yang telah diinginkan.

Manajemen Strategi

Hery (2018) menjelaskan bahwa manajemen strategi merupakan tindakan manajemen yang berkaitan dengan kinerja jangka panjang organisasi. Manajemen strategis menghimpun seluruh fungsi dasar manajemen, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, implementasi dan pengendalian strategi.

Hery (2018) juga menjelaskan bahwa manajemen strategis memainkan peran penting untuk meningkatkan kinerja organisasi. Strategi yang terencana dengan baik memungkinkan organisasi untuk mendapat keuntungan, mendominasi pasar, memperoleh keunggulan kompetitif, dan mendapat kekayaan atau keuntungan bagi pemegang saham.

Sementara itu, Fred R. David (2009) menyatakan bahwa manajemen strategis merupakan seni dan ilmu merumuskan, menerapkan, mengevaluasi dan pengambilan keputusan strategis untuk mencapai tujuan organisasi.

Sedangkan Sondang P. Siagian (2006) menjelaskan bahwa pengambilan keputusan adalah pendekatan sistematis terhadap sifat dan tindakan dari alternatif yang diperhitungkan sebagai tindakan tercepat.

Dalam mencapai suatu tujuan, organisasi harus memiliki strategi yang tepat dan terukur sehingga dapat memperoleh hasil sesuai harapan serta dapat dilakukan evaluasi yang terukur.

Belanja Negara

Pada PMK Nomor 196/PMK.05/2018 tersebut dijelaskan bahwa Pembayaran Langsung atau yang biasa disebut LS merupakan

pembayaran yang dilaksanakan secara langsung kepada Bendahara Pengeluaran (BP)/ penerima lain melalui Surat Perintah Membayar Langsung (SPM LS) berdasarkan kontrak, surat keputusan, surat tugas atau surat perintah kerja lainnya. Dalam mekanisme SPM LS, dana ditransfer langsung dari rekening kas negara ke rekening penerima. Sedangkan Uang Persediaan (UP) adalah uang muka pekerjaan sejumlah tertentu yang diberikan kepada BP untuk kegiatan sehari-hari satuan kerja atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan peruntukannya tidak memungkinkan melalui SPM LS.

Transaksi Kartu Kredit Pemerintah

PMK Nomor 196/PMK.05/2018 menjelaskan bahwa Kartu Kredit Pemerintah merupakan alat pembayaran melalui media kartu yang dapat digunakan untuk membayar belanja yang dibebankan pada APBN, serta kewajiban pembayaran dipenuhi oleh Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah terlebih dahulu untuk kemudian dilakukan pelunasan secara sekaligus oleh Satker.

Sedangkan pada peraturan yang sama disebutkan bahwa pemegang KKP adalah pejabat dan/ atau pegawai di lingkungan Satker K/L dengan status sebagai Pejabat Negara, PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri, atau pegawai lainnya sesuai penetapan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Satker merupakan unit kerja K/L atau Pemda yang menyelenggarakan kegiatan K/L serta memikul wewenang dan tanggung jawab penggunaan anggaran.

PMK nomor 196/PMK.05/2018 juga menyampaikan redefinisi Uang Persediaan (UP) yang terbagi menjadi dua jenis sebagai berikut:

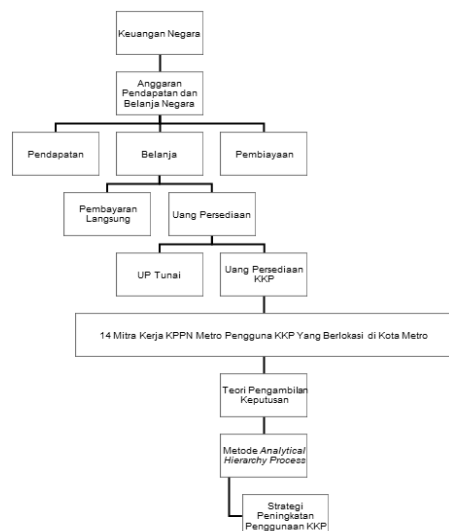
1. UP Tunai adalah uang muka kerja sejumlah tertentu kepada Bendahara Pengeluaran (BP) melalui rekening BP secara tunai untuk biaya sehari-hari unit kerja serta biaya pengeluaran yang tidak bisa dibayar dengan SPM LS.
2. UP KKP adalah uang muka kerja dalam bentuk limit kredit yang digunakan untuk biaya sehari-hari unit kerja serta biaya pengeluaran yang tidak bisa dibayar dengan SPM LS.

Rasio standar UP ditentukan sebagai berikut: UP tunai 60% dan UP KKP 40% dari total nilai UP.

Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir pada penelitian ini penulis sajikan melalui gambar 1 berikut:

Gambar 1: Kerangka Berpikir Penelitian



METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti ialah campuran yaitu pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan rancangan penelitian studi kasus. Sedangkan penelitian dibatasi pada satker yang berlokasi di Kota Metro dengan mempertimbangkan fasilitas mesin EDC yang tersedia. Setiap daerah memiliki corak pertumbuhan ekonomi yang spesifik lokasi sesuai dengan karakter wilayah dan potensi sumberdaya yang ada (Suhada:2017).

Selain itu, teknik Analytical Hierarchy Process (AHP) dipilih untuk memilih strategi terbaik. Metode AHP sendiri merupakan teknik penentuan strategi kualitatif, yang kemudian dihitung secara kuantitatif berdasarkan data lapangan dan pengalaman untuk sampai pada strategi terbaik. Dalam hal ini, data kualitatif diolah sedemikian rupa sehingga dapat dihitung secara kuantitatif. Saaty (2008) menjelaskan bahwa cara perhitungan metode AHP sebagai berikut:

1. Tetapkan kriteria.
2. Tentukan nilai kriteria dengan perbandingan berpasangan skala 1-9. Data yang sudah didapat disusun menjadi matriks.
3. Hitung Total Nilai pada masing-masing kolom matriks.
4. Bagi masing-masing nilai dari kolom dengan nilai total kolom masing-masing hingga didapat data normalisasi.
5. Hitung total nilai dari masing-masing baris lalu bagi pada jumlah elemen untuk

- memperoleh nilai rata-rata yang merupakan data prioritas per kriteria
- Kali masing-masing nilai di kolom satu dengan nilai prioritas elemen satu, nilai di kolom dua dengan nilai prioritas elemen dua, sampai selesai.
 - Hitung total nilai masing-masing baris
 - Bagi Nilai total baris dengan Nilai prioritas relatif masing-masing.
 - Tambah hasil perhitungan tersebut diatas dengan jumlah elemen sehingga didapat λ maks
 - Hitung Indeks Konsistensi (CI) dengan rumus : $CI = (\lambda \text{ maks} - n) / n - 1$, n merupakan jumlah elemen.
 - Hitung Rasio Konsistensi (CR) dengan rumus : $CR = CI / IR$, dengan IR merupakan Indeks Random Consistency yang dapat dilihat pada tabel 2 berikut:

Tabel 2: Daftar Indeks Random Consistency (IR)

Ukuran Matriks	1,2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Nilai IR	0.00	0.58	0.90	1.12	1.24	1.32	1.41	1.45	1.49	1.51	1.48	1.56	1.57	1.59

Sumber: Saaty, 2008

- Cek konsistensi hierarki. Jika hasil lebih dari 10% , maka harus diperbaiki. Jika rasio (CI/IR) kurang dari sama dengan 0,1 maka hasil perhitungan dinyatakan konsisten.

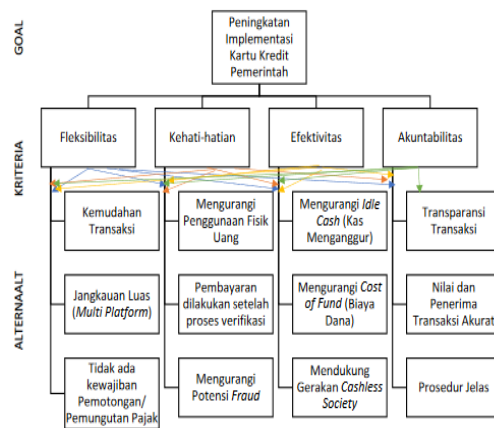
Data kriteria yang akan digunakan sesuai prinsip penggunaan Kartu Kredit Pemerintah yang merupakan keunggulan dari Kartu Kredit Pemerintah, yaitu:

- Fleksibilitas

- Kehati-hatian
- Efektivitas
- Akuntabilitas

Sehingga didapat hierarki dalam penelitian ini sesuai gambar 2 berikut:

Gambar 2: Strategi Peningkatan Implementasi Kartu Kredit Pemerintah



HASIL PENELITIAN

1. Pembobotan Kriteria

Kriteria yang telah ditentukan dibuat dalam matriks perbandingan *pairwise* dengan memberikan pertanyaan tertutup kepada responden. Selanjutnya disajikan pada tabel penjumlahan kolom matriks berdasarkan kriteria pada tabel 3 lalu disederhanakan pada tabel 4 berikut:

Tabel 3: Matriks Faktor Pembobotan Kriteria

Tabel 3: Matriks Faktor Pembobotan Kriteria

Penjumlahan Kolom Matrik Berdasarkan Kriteria				
KRITERIA	Fleksibilitas	Kehati-hatian	Efektivitas	Akuntabilitas
Fleksibilitas	1	3,38	3,73	2,81
Kehati-hatian	1/3,38	1	2,76	1/3,09
Efektivitas	1/3,73	1/2,76	1	1/4,04
Akuntabilitas	1/2,81	3,09	4,04	1
TOTAL	1,92	7,83	11,52	4,38

Sumber: Data diolah

Tabel 4: Matriks Faktor Pembobotan Kriteria Yang Disederhanakan

Penjumlahan Kolom Matrik Berdasarkan Kriteria				
KRITERIA	Fleksibilitas	Kehati-hatian	Efektivitas	Akuntabilitas
Fleksibilitas	1,00	3,38	3,73	2,81
Kehati-hatian	0,30	1,00	2,76	0,32
Efektivitas	0,27	0,36	1,00	0,25
Akuntabilitas	0,36	3,09	4,04	1,00
TOTAL	1,92	7,83	11,52	4,38

Sumber: Data diolah

Setelah didapat matriks pada tabel 4 tersebut, selanjutnya dibuat matriks normalisasi dengan membagi nilai pada tiap kolom dibagi dengan nilai total kolom sebagaimana tabel 5 berikut:

Tabel 5: Normalisasi Matriks Kriteria

Normalisasi Matriks Kriteria					
KRITERIA	Fleksibilitas	Kehati-hatian	Efektivitas	Akuntabilitas	Eigen Vector
Fleksibilitas	0,52	0,43	0,32	0,64	0,48
Kehati-hatian	0,15	0,13	0,24	0,07	0,15
Efektivitas	0,14	0,05	0,09	0,06	0,08
Akuntabilitas	0,19	0,39	0,35	0,23	0,29
TOTAL					1,00

Sumber: Data diolah

Setelah mendapat eigen vector, matriks perbandingan semula dikalikan dengan matriks pada nilai rata-rata.

Sehingga:

$$\begin{bmatrix} 1,0 & 3,38 & 3,73 & 2,81 \\ 0,30 & 1,00 & 2,76 & 0,32 \\ 0,27 & 0,36 & 1,00 & 0,25 \\ 0,36 & 3,09 & 4,04 & 1,0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0,48 \\ 0,15 \\ 0,08 \\ 0,29 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,48 & 0,50 & 0,31 & 0,81 \\ 0,14 & 0,15 & 0,23 & 0,09 \\ 0,13 & 0,05 & 0,08 & 0,07 \\ 0,17 & 0,46 & 0,33 & 0,29 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0,48 & 0,50 & 0,31 & 0,81 \\ 0,14 & 0,15 & 0,23 & 0,09 \\ 0,13 & 0,05 & 0,08 & 0,07 \\ 0,17 & 0,46 & 0,33 & 0,29 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2,10 \\ 0,61 \\ 0,34 \\ 1,25 \end{bmatrix} :$$

$$\begin{bmatrix} 0,48 \\ 0,15 \\ 0,08 \\ 0,29 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4,3859 \\ 4,1095 \\ 4,0879 \\ 4,3229 \end{bmatrix}$$

Selanjutnya untuk menguji konsistensi hierarki, dilakukan penghitungan Consistency Index (CI)

lanjut dengan penghitungan Rasio Konsistensi/ *Consistency Ratio* (CR)

$$CI = (\lambda \text{ maks} - n)/n-1 \\ = (4,23-4)/4-1 \\ = 0,08$$

$$CR = CI/IR \\ = 0,08/0,9 \\ = 0,08$$

Karena $CR < 0,1$ berarti preferensi responden adalah konsisten. Dari hasil perhitungan pada tabel diatas diperoleh urutan prioritas berikut:

1. Fleksibilitas dengan bobot 0,48 atau 48%,
2. Akuntabilitas dengan bobot 0,29 atau 29%
3. Kehati-hatian dengan bobot 0,15 atau 15%
4. Efektivitas dengan bobot 0,08 atau 8%

Selanjutnya dilakukan perhitungan vektor prioritas dengan mengalikan baris pada Tabel 9 kemudian ditarik akar pangkat n dengan n adalah jumlah kriteria. Hasil setiap baris dibagi dengan jumlah dari hasil semua baris. Dengan demikian dapat diperoleh vektor prioritasnya, yaitu:

$$\sqrt[4]{1 \times 3,38 \times 3,73 \times 2,81} = 2,438 \quad (1)$$

$$\sqrt[4]{0,30 \times 1 \times 2,76 \times 0,32} = 0,716 \quad (2)$$

$$\sqrt[4]{0,27 \times 0,36 \times 1 \times 0,25} = 0,394 \quad (3)$$

$$\sqrt[4]{0,36 \times 3,09 \times 4,04 \times 1} = 1,452 \quad (4)$$

$$\Sigma = 5,001 \quad (5)$$

Setelah didapat persamaan 1,2,3, dan 4 dilanjutkan membagi hasil

persamaan dengan jumlah total sebagai berikut:

Vektor Prioritas:

$$2,4387 : 5,001 = 0,487$$

$$0,7166 : 5,001 = 0,143$$

$$0,3940 : 5,001 = 0,078$$

$$1,4521 : 5,001 = 0,290$$

2. Pembobotan Alternatif

a. Alternatif Pada Kriteria Fleksibilitas

Analisis alternatif dari kriteria fleksibilitas yang diambil dari pertanyaan tertutup, kemudian disajikan pada tabel penjumlahan kolom matriks pada tabel 6 yang kemudian disederhanakan pada tabel 7 berikut:

Tabel 6: Matriks Faktor Pembobotan Alternatif Kriteria Fleksibilitas

Penjumlahan Kolom Matriks Berdasarkan Alternatif Pada Kriteria Fleksibilitas			
KRITERIA	Kemudahan Transaksi	Jangkauan Luas (Multi Platform)	Tidak ada Kewajiban Pemotongan/ Pemungutan Pajak
Kemudahan Transaksi	1	1/2,51	2,12
Jangkauan Luas (Multi Platform)	2,51	1	2,95
Tidak ada Kewajiban Pemotongan/ Pemungutan Pajak	1/2,12	1/2,95	1
TOTAL	4,04	1,74	6,07

Sumber: Data diolah

Tabel 7: Matriks Faktor Pembobotan Alternatif Kriteria Fleksibilitas Yang Disederhanakan

Penjumlahan Kolom Matriks Berdasarkan Alternatif Pada Kriteria Fleksibilitas			
KRITERIA	Kemudahan Transaksi	Jangkauan Luas (Multi Platform)	Tidak ada Kewajiban Pemotongan/ Pemungutan Pajak
Kemudahan Transaksi	1	0,4	2,12
Jangkauan Luas (Multi Platform)	2,51	1	2,95
Tidak ada Kewajiban Pemotongan/ Pemungutan Pajak	0,53	0,34	1
TOTAL	4,04	1,74	6,07

Sumber: Data diolah

Setelah didapat matriks pada tabel 7 tersebut, selanjutnya dibuat matriks normalisasi dengan membagi nilai pada

tiap kolom dibagi dengan nilai total kolom sebagaimana tabel 8 berikut:

Tabel 8: Normalisasi Matriks Alternatif Pada Kriteria Fleksibilitas

Normalisasi Matriks Alternatif Pada Kriteria Fleksibilitas				
KRITERIA	Kemudahan Transaksi	Jangkauan Luas (Multi Platform)	Tidak ada Kewajiban Pemotongan/ Pemungutan Pajak	Eigen Vector
Kemudahan Transaksi	0,25	0,23	0,35	0,28
Jangkauan Luas (Multi Platform)	0,62	0,58	0,49	0,56
Tidak ada Kewajiban Pemotongan/ Pemungutan Pajak	0,13	0,20	0,16	0,16
Total				1,00

Sumber: Data diolah

Setelah mendapat eigen vector, matriks perbandingan semula dikalikan dengan matriks pada nilai rata-rata.

Sehingga:

$$\begin{bmatrix} 1,0 & 0,40 & 2,12 \\ 2,51 & 1,0 & 2,95 \\ 0,53 & 0,34 & 1,00 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0,28 \\ 0,56 \\ 0,16 \end{bmatrix} =$$

$$\begin{bmatrix} 0,28 & 0,22 & 0,35 \\ 0,69 & 0,56 & 0,48 \\ 0,15 & 0,19 & 0,16 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,85 \\ 1,73 \\ 0,50 \end{bmatrix} : \begin{bmatrix} 0,28 \\ 0,56 \\ 0,16 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3,0712 \\ 3,0925 \\ 3,0528 \end{bmatrix}$$

Untuk menguji konsistensi hierarki, dilakukan penghitungan Consistency Index (CI) lanjut dengan penghitungan Rasio Konsistensi/ Consistency Ratio (CR).

$$CI = (\lambda \text{ maks} - n)/n-1 = (3,07-3)/3-1 = 0,04$$

$$CR = CI/IR = 0,02/0,58 = 0,06$$

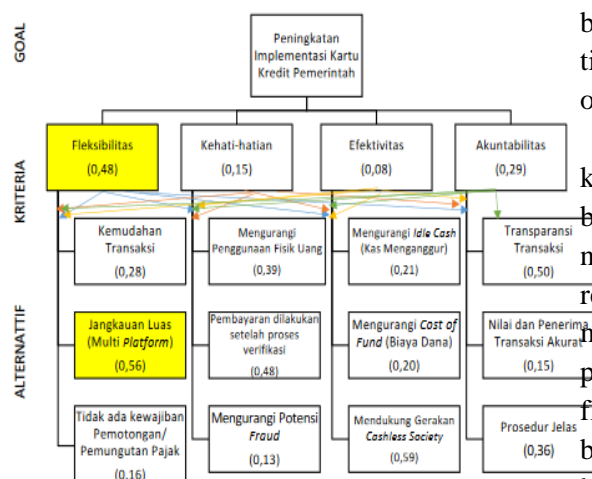
Karena $CR < 0,1$ berarti preferensi responden adalah konsisten. Dari hasil perhitungan pada tabel diatas diperoleh urutan prioritas berikut:

1. Jangkauan luas dengan nilai bobot 0,56 atau 56%
2. Kemudahan transaksi dengan nilai 0,28 atau 28%
3. Tidak ada kewajiban pemotongan/pemungutan pajak dengan nilai 0,16 atau 16%.

PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian didapat hasil pembobotan pada kriteria dan alternatif yang dirangkum dalam gambar 3 berikut:

Gambar 3: Hierarki Strategi Peningkatan Implementasi KKP Setelah Penelitian



Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan didapat pembobotan kriteria sebagai berikut:

1. Fleksibilitas dengan bobot 0,48 atau 48%
2. Kehati-hatian dengan bobot 0,15 atau 15%
3. Efektivitas dengan bobot 0,08 atau 8%
4. Akuntabilitas dengan bobot 0,29 atau 29%

Pembobotan tersebut menunjukkan kriteria fleksibilitas menjadi kriteria dengan bobot tertinggi

dengan nilai 48% diikuti oleh akuntabilitas 29%, kehati-hatian 15% dan efektivitas 8%. Sedangkan rasio konsistensi sebesar 0,08, sehingga matriks dinyatakan konsisten karena dibawah hasil uji rasio konsistensi dibawah $\leq 0,1$. Dengan demikian, matriks kriteria dapat menjadi dasar mengambil kesimpulan yang valid.

Berdasarkan jawaban dari pertanyaan terbuka, responden berpendapat fleksibilitas menjadi daya tarik utama penggunaan kartu kredit pemerintah, sedangkan kriteria efektivitas dianggap tidak terlalu berpengaruh oleh responden karena tidak banyak berdampak pada operasional satuan kerja.

Fleksibilitas dianggap menarik karena menawarkan pengalaman berbeda dibandingkan metode belanja negara yang telah ada sebelumnya, responden berpendapat dengan menggunakan kartu kredit pemerintah proses belanja negara menjadi lebih fleksibel dan mudah. Responden juga berpendapat dengan menggunakan kartu kredit jangkauan belanja menjadi lebih luas dengan memanfaatkan mesin EDC pada vendor maupun melalui media online.

Selanjutnya karena kriteria fleksibilitas mendapat bobot tertinggi, pembahasan akan difokuskan kepada alternatif pada kriteria fleksibilitas. Berdasarkan hasil penelitian didapat pembobotan alternatif pada kriteria fleksibilitas sebagai berikut:

1. Kemudahan transaksi dengan nilai 0,28 atau sebesar 28%

2. Jangkauan luas (*Multi Platform*) dengan nilai 0,56 atau sebesar 56%
3. Tidak ada kewajiban pemotongan/pemungutan pajak dengan nilai 0,16 atau sebesar 16%

Hasil pembobotan tersebut menunjukkan alternatif Jangkauan Luas/*Multi Platform* menjadi alternatif dengan bobot tertinggi dengan nilai 56%, diikuti kemudahan transaksi 28% dan tidak ada kewajiban pemotongan/pemungutan pajak 16%. Sedangkan rasio konsistensi sebesar 0,06, sehingga matriks dinyatakan konsisten karena dibawah hasil uji rasio konsistensi dibawah $\leq 0,1$. Dengan demikian, matriks alternatif pada kriteria fleksibilitas dapat menjadi dasar mengambil kesimpulan yang valid.

Pada alternatif kemudahan transaksi, responden berpendapat kartu kredit pemerintah mempermudah belanja karena tidak digunakannya uang tunai sehingga kegiatan belanja menjadi lebih ringkas. Sedangkan untuk alternatif tidak ada kewajiban pemotongan/ pemungutan pajak, responden berpendapat bahwa alternatif ini sangat membantu karena selama ini kewajiban pemotongan/pemungutan pajak menjadi pekerjaan yang cukup sulit dan rawan kesalahan, sehingga tidak adanya kewajiban tersebut dapat meringankan tugas satuan kerja. Selain itu, tidak adanya kewajiban pemotongan/pemungutan pajak membuat satuan kerja dapat memaksimalkan anggaran untuk mendapat output secara maksimal, karena selama ini vendor menyerahkan pembayaran pajak kepada satuan kerja

sehingga harga barang menjadi lebih mahal.

Jangkauan luas (*Multi platform*) mendapat bobot tertinggi sebagai alternatif dari kriteria fleksibilitas berdasarkan pendapatd dari responden. Berdasarkan pertanyaan terbuka responden berpendapat dengan Kartu Kredit Pemerintah diharapkan dapat memeperluas jangkauan belanja satuan kerja, sehingga satuan kerja dapat memperoleh harga yang paling kompetitif sehingga mendapatkan efisiensi belanja.

Selain memberikan pendapat pada pertanyaan terbuka, beberapa responden menyampaikan harapan terkait penggunaan Kartu Kredit Pemerintah, yaitu:

1. Perlu penambahan jumlah penyedia yang memiliki mesin EDC
2. Kartu Kredit Pemerintah agar dapat digunakan pada platform belanja *online*.
3. Belum tersedianya banyak penyedia barang/jasa pada Aplikasi *Digital Payment* (Digipay) khususnya vendor yang selama ini menjadi langganan belanja satuan kerja.

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara penulis dengan KPPN Metro didapat fakta sebagai berikut:

1. KKP dapat digunakan pada platform *e-commerce mainstream* seperti Tokopedia, Shopee, dan lainnya sebagaimana penggunaan kartu kredit pribadi.
2. Terdapat platform Digipay (*Digital Payment*) yang merupakan kerjasama Kementerian Keuangan dan Bank Himbara (Bank Mandiri, BRI, dan BNI) sebagai *platform* belanja menggunakan uang persediaan dengan mekanisme

pembayaran melalui *virtual account* dan kartu kredit pemerintah.

Berdasarkan pendapat responden dan hasil wawancara dengan KPPN Metro dapat diambil beberapa poin berikut:

1. Terdapat *gap* pengetahuan terkait penggunaan *platform* belanja *online*. KPPN Metro belum cukup melakukan sosialisasi kepada satuan kerja sehingga masih ada satker yang belum mengerti secara utuh terkait penggunaan KKP.
2. KPPN Metro agar bekerja sama dengan perbankan untuk mengajak lebih banyak penyedia barang/jasa menggunakan mesin EDC sebagai salah satu metode pembayaran.
3. Memaksimalkan penggunaan aplikasi Digipay dengan penambahan penyedia barang/jasa terdaftar, khususnya penyedia barang/jasa yang merupakan langganan satuan kerja. KPPN Metro dapat meminta data kepada satuan kerja untuk memulai rekrutmen penyedia barang/jasa.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1. Seluruh matriks yang didapat dari penelitian telah diuji konsistensi dan dinyatakan konsisten, sehingga hasil penelitian dapat digunakan untuk pengambilan kesimpulan.
2. Kriteria yang dianggap paling penting oleh responden adalah fleksibilitas.
3. Alternatif pada kriteria fleksibilitas yang dianggap paling penting

adalah jangkauan luas (*Multi platform*).

4. Satuan Kerja berpendapat dengan Kartu Kredit Pemerintah diharapkan dapat memperluas jangkauan belanja satuan kerja, sehingga satuan kerja dapat memperoleh harga yang paling kompetitif sehingga mendapatkan efisiensi belanja.
5. Satuan Kerja berpendapat kartu kredit pemerintah mempermudah belanja karena tidak digunakannya uang tunai sehingga kegiatan belanja menjadi lebih ringkas.
6. Satuan Kerja berpendapat bahwa tidak adanya kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak sangat membantu karena selama ini kewajiban pemotongan/pemungutan pajak menjadi pekerjaan yang cukup sulit dan rawan kesalahan, sehingga tidak adanya kewajiban tersebut dapat meringankan tugas satuan kerja. Selain itu, satuan kerja dapat memaksimalkan anggaran untuk mendapat output secara maksimal, karena mekanisme pada belanja menggunakan uang persediaan selama ini, urusan pembayaran pajak menjadi tanggung jawab satuan kerja sehingga harga barang menjadi lebih mahal
7. Satuan Kerja berpendapat penambahan jumlah penyedia yang memiliki mesin EDC dan platform yang kompatibel dengan metode belanja melalui kartu kredit pemerintah penting untuk meningkatkan fleksibilitas

penggunaan kartu kredit pemerintah.

8. Terdapat Satuan Kerja yang tidak mengetahui bahwa kartu kredit pemerintah dapat digunakan untuk belanja baik pada *e-commerce mainstream* seperti Tokopedia, Shopee, dan lainnya maupun pada Aplikasi *Digital Payment* (Digipay).

Saran

Berdasarkan penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Metro untuk meningkatkan penggunaan kartu kredit pemerintah, diantaranya:

1. KPPN Metro dapat berfokus pada keunggulan fleksibilitas serta ketiga alternatif pada kriteria fleksibilitas sebagai daya tarik kepada satuan kerja agar menggunakan kartu kredit pemerintah.
2. Meningkatkan kerja sama dengan pihak perbankan untuk memperluas jangkauan penggunaan mesin EDC pada penyedia barang/jasa di wilayah kerja KPPN Metro.
3. Memaksimalkan penggunaan aplikasi Digipay dengan penambahan penyedia barang/jasa terdaftar, khususnya penyedia barang/jasa yang merupakan langganan satuan kerja. KPPN Metro dapat meminta data kepada satuan kerja untuk memulai rekrutmen penyedia barang/jasa.
4. Sosialisasi kepada satuan kerja secara konsisten, khususnya menyampaikan fleksibilitas penggunaan kartu kredit pemerintah yaitu selain metode belanja dengan mendatangi toko konvensional,

dapat menggunakan *e-commerce mainstream* seperti Tokopedia, Shopee dan lainnya serta aplikasi Digipay.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J.W., 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. United States of America: SAGE Publications.
- David, Fred R. 2009. *Manajemen Strategis*. Jakarta: Salemba 4.
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 2022. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 12/PB/2022 Tentang *Tata Cara Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dengan Menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Domestik*.
- Hery. 2018. *Manajemen Strategik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Kementerian Keuangan. 2018. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 tentang *Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah*.
- Maulid, Lelly Cesarina., dan Yudha Aryo Sudiby. 2020. *Kartu Kredit Pemerintah Sebagai Alat Pembayaran Belanja Negara di Indonesia: Permasalahan dan Solusi*. Samarinda: Akuntabel Vol 17.
- Mulyono, S. (2004). *Riset Operasi*. Edisi Kedua. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Saaty, T.L. (2008) *Decision Making with the Analytic Hierarchy Process*. International Journal of Services Sciences, 1, 83. <https://doi.org/10.1504/IJSSCI..>

- Siagian, Sondang. 2006. *Manajemen Informasi Sistem Informasi-Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suhada, Bambang. 2017. *Strategi Pengembangan Ekonomi Lokal Kabupaten Lampung Timur*. Metro: Jurnal Ilmiah FE-UMM: Vol II
- Terry, George R., dan Leslie W. Rue. 2014. *Dasar-Dasar Manajemen (Principles of Management)*, Terj. G.A. Ticoalu. Jakarta: Bumi Aksara.
- Torang, Syamsir. (2013). *Organisasi & Manajemen: Perilaku, Struktur, Budaya. & Perubahan Organisasi*. Yogyakarta: Delta Buku.